

ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN (*RECOGNITION*) PEMERINTAHAN BARU DI MYANMAR (STUDI KUDETA MILITER MYANMAR)

Dimas Zulhasni Wigraha,¹ Budi Parmono,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21801021057@unisma.ac.id

ABSTRACT

The research objective are the case of the military junta's coup position in Myanmar, and the recognition of the new government resulting from the military junta coup in Myanmar in the perspective of international law. This research is a normative juridical law research using a statutory approach, a case approach, a comparative approach, a comparative approach, and conceptual, while the legal material collection technique used in this research is a document or literature study. The conclusion of this study is that the coup event in Myanmar has occurred three times, namely in 1962, 1988, and 2021. The recognition of the new government of the Myanmar military junta has not yet received official recognition from other countries or the international community, this has resulted in the government of the military junta Myanmar finds it difficult to establish relations with other countries.

Key Words: *Coup, Myanmar Military Junta, Recognition*

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai posisi kudeta junta militer di Myanmar, dan pengakuan (*recognition*) terhadap pemerintahan baru hasil kudeta junta militer di Myanmar dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, pendekatan komparatif, dan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peristiwa kudeta di Myanmar telah terjadi sebanyak tiga kali, yaitu tahun 1962, 1988, dan 2021. Pengakuan pemerintahan baru junta militer Myanmar hingga saat ini belum mendapat pengakuan resmi dari negara lain atau masyarakat internasional, hal ini mengakibatkan pemerintah junta militer Myanmar kesulitan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Kata Kunci: Kudeta, Junta Militer Myanmar, Pengakuan

PENDAHULUAN

Menurut sarjana hukum internasional berpendapat bahwa pengakuan (Inggris: *recognition*, Prancis: *reconnaissance*, Jerman: *anerkennung*) adalah wadah yang memegang peranan penting dalam jalinan antarnegara. Pada abad ke-20 ini tidak ada satupun negara bisa hidup bersaing dari negara lainnyadan perkembangan teknologi telah berpengaruh menciptakan jalinan interpendensi yang erat antarnegara didunia ini.⁴

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Yulita Pujilestari, "Peranan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol No. 5, (2 September 2018), Hal. 169

Dalam Hukum Internasional, Pengakuan (*recognition*) merupakan bentuk pernyataan formal tentang status negara yang berdaulat dari suatu negara kepada negara lainnya. Recognition sebagai sebuah tindakan diplomatik dapat diberikan secara sepihak oleh satu negara maupun lebih. Tujuan praktis dari recognition adalah untuk mengawali hubungan resmi antara negara yang mengakui dengan negara yang diakui. Pengakuan secara konstitutif dapat menciptakan status kenegaraan atau melengkapi otoritas pemerintahan baru di lingkungan internasional.⁵

Pengakuan dari negara lain sangatlah penting karena merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara, semakin banyak negara yang mengakui maka akan semakin kuat pula kedaulatan negara yang diakui dan tanpa adanya pengakuan dari negara lain maka negara tersebut akan kesulitan dalam menjalin hubungan resmi dengan negara lain.

Setelah adanya pengakuan, situasi baru suatu negara dianggap berlaku terhadap negara yang mengakuinya, hal ini berarti bahwa konsekuensi hukum negara yang bersangkutan akan terjadi. Dengan demikian, pengakuan merupakan keterlibatan suatu negara dalam proses hukum internasional secara umum, dan juga menjadi penting dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara lain.

Bentuk pemberian pengakuan diantaranya Pengakuan terhadap negara baru, jelas, pengakuan ini diberikan kepada suatu negara (berupa pengakuan baik *de facto* maupun *de jure*), Pengakuan terhadap pemerintahan baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahannya (yang berkuasa). Ini terjadi jika wujud pemerintahan yang lama dan yang baru sangat terlihat perbedaannya. Pengakuan terhadap pemberontak. Pengakuan ini dipersembahkan kepada sekelompok perlawanan yang sedang melaksanakan perlawanan kepada pemerintah.⁶

Pengakuan pemerintahan ialah suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintahan baru yang diakui sebagai suatu kesatuan dan bertindak untuk dan atas nama negaranya.⁷ Pengakuan pemerintahan dan bergantinya pemerintahan baru dalam suatu negara ini sering menimbulkan situasi politik yang memanas diantara kedua belah kubu yang terlibat. Keadaan seperti ini terjadi khususnya manakala pergantian pemerintahan tersebut dilakukan menurut cara-cara konstitusional, yaitu

⁵ Brenda Lengkong, "Fungsi Pengakuan (Recognition) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional" *Lex Administratum*, Vol. VI No. 1, (Jan-Mar, 2018), Hal. 21

⁶ Yulita Pujilestari, "Peranan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol No. 5, (2 September 2018), Hal. 170

⁷ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Bandung; Pt. Alumni, Hal. 72

cara-cara yang sah, cara-cara yang terjadi secara normal sesuai dengan kehidupan politik negara yang bersangkutan, baik itu dilakukan melalui pemilihan umum, ataupun yang lainnya.⁸

Yang menjadi masalah dalam peristiwa pergantian suatu pemerintahan yang didalamnya terkait dengan pengakuan pemerintahan yaitu apabila pergantian pemerintahan tersebut dilakukan melalui cara-cara yang tidak konstitusional. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan jalan revolusioner atau melalui cara-cara yang ekstra yuridik, misalnya, *coup d'état* (Kudeta), revolusi, *insurrection* (pemberontakan), dan lain-lain.⁹

Kasus mengenai pergantian kekuasaan yang cukup menyita perhatian dunia internasional juga terjadi di Myanmar pada Februari 2021. Pergantian kekuasaan ini dilakukan militer Myanmar dengan cara kudeta yang ditujukan kepada pemerintahan sipil.

Kudeta sendiri menurut beberapa pihak secara umum adalah suatu cara penggulingan kekuasaan dan pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari tangan penguasa dan dapat dilakukan oleh golongan tertentu baik militer atau tentara maupun sipil serta dilakukan secara keras karena ada unsur paksaan. Kata “kudeta” sebenarnya punya pengertian sebagai kegiatan yang dijalankan oleh pihak atau golongan yang sudah berkuasa dengan melemahkan atau menyingkirkan orang atau lembaga lain yang mengambil bagian dalam pemerintahan.¹⁰

Myanmar merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang sering mengalami peristiwa kudeta. Tercatat sebanyak tiga kali peristiwa kudeta terjadi, yaitu pada tahun 1962, 1988, dan yang terbaru pada 2021. Peristiwa kudeta tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak militer Myanmar atau Tatmadaw. Banyaknya kudeta di Myanmar yang dilakukan oleh pihak militer menunjukkan bahwa militer sangat berambisi dalam mempertahankan dominasi dan kekuasaannya di Myanmar.

Beberapa waktu belakangan ini kudeta militer Myanmar kembali terjadi, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021. Kudeta 2021 terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020, dimana Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, selisih kemenangan yang lebih besar dibanding dengan pemilu 2015. Partai militer, dan Partai

⁸ Huala Adolf, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta; Rajawali Pers, Hal. 73

⁹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Bandung: Pt. Alumni, Hal. 74

¹⁰ “Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, dari Kes sampai Par” dalam <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/09/0123.html>, diakses tgl 04 Desember 2021 jam 09.00

Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, hanya memenangkan 33 kursi. Militer membantah hasil tersebut, mengklaim bahwa pemungutan suara itu curang.¹¹

Dalam kudeta ini Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Ming Aung Hlaing.¹²

Setelah terjadinya kudeta tersebut maka pemerintahan di Myanmar mengalami pergantian, dari pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokrasi dan berpindah kepada pemerintahan junta militer yang berkuasa melalui proses kudeta. Pengakuan pemerintahan junta militer Myanmar nampaknya akan sulit didapat mengingat pergantian pemerintahan secara inkonstitusional dan banyak menuai kecaman masyarakat internasional karena tindakan junta militer yang sangat represif terhadap rakyat sipil/demonstran anti kudeta militer, masyarakat internasional menilai hal ini sebagai pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang di kaji adalah bagaimana kasus posisi kudeta militer di Myanmar, dan status pengakuan terhadap pemerintahan baru hasil kudeta militer khususnya yang terjadi di Myanmar menurut hukum internasional.

PEMBAHASAN

Kasus Posisi Kudeta Junta Militer Di Myanmar

Masuknya militer dalam pemerintahan suatu negara terlebih negara-negara yang baru merdeka kerap terjadi, hal ini dikarenakan masalah politik, sosial, dan ekonomi yang begitu kompleks serta rentannya pemerintahan sipil terhadap masalah yang dialami tersebut yang memang baru saja merdeka dan masih dalam tahap pembelajaran untuk memulihkan keadaan dan menemukan suatu pola demi keberlangsungan negaranya, hal tersebut mengakibatkan militer berinisiatif untuk ikut campur dan meng-intervensi pemerintahan. Meluasnya peran pihak militer dalam pemerintahan memiliki faktor-faktor tertentu, yaitu:

Seperti yang dikemukakan oleh Ulf Sundhaussen yang mengatakan bahwa penyebab intervensi militer terbagi menjadi dua faktor. Faktor Internal: Pertama, perwira-perwira intervensionis didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusional. Kedua, intervensi militer didorong oleh

¹¹ “Bak Candu, Myanmar & Sejarah Kudeta Yang Terus Berulang” Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210209135949-4-222152/bak-candu-myanmar-sejarah-kudeta-yang-terus-berulang/2>, Diakses tanggal 04 Desember 2021 jam 10.30

¹² “Kudeta Myanmar 2021” Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta_Myanmar_2021 Diakses tanggal 04 Desember 2021 jam 11.00

kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. Ketiga, kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil. Keempat, intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwira yang harus wibawa dan kuasa.¹³

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yang terdiri dari: Pertama, intervensi militer dalam politik sebagai akibat dari struktur politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. Kedua, kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah atau kelompok sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas politik. Ketiga, kelompok sipil dianggap tidak mampu dalam melakukan modernisasi ekonomi. Keempat, terjadinya disintegrasi nasional.¹⁴

Myanmar merupakan salah satu negara yang militernya sangat mencampuri pemerintahan. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada pihak militer, seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar diambil alih oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan, dan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan oleh Davis I. Steinberg yang menyebut Myanmar sebagai *the most monolithically military-controlled in the world*. Hal ini disebabkan kondisi pemerintahan Myanmar yang sangat dikendalikan oleh militer sejak tahun 1962.¹⁵

Konflik antara militer Myanmar dengan pemerintahan sipil sudah berlangsung sejak 1940-an, dan negara ini sudah tiga kali mengalami kudeta. Setelah merdeka, pemerintahan sipil mengalami awalan buruk pada 1948. setahun sebelumnya pimpinan nasionalis karismatik Jenderal Aung San yang merupakan ayah Aung San Suu Kyi dibunuh. Kepemimpinan lalu dilimpahkan ke U Nu yang secara politik kurang kuat.¹⁶

Kudeta merupakan isu yang tidak asing bagi Myanmar, sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948, tercatat Myanmar telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Militer pernah menguasai pemerintahan Myanmar selama puluhan tahun, dan sepanjang masa itu pula berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta yang terjadi di Myanmar mengalami beberapa fase hingga sekarang ini, bahkan sebelum pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar negara ini mengalami peristiwa kudeta di tahun 1962. Oleh karena itu terjadinya

¹³ Ikrimah, Skripsi: "Pemeranan Asean Mendorong Pemerintahan Militer Dalam Menegakkan Demokrasi Di Myanmar" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Hal. 21

¹⁴ *Ibid.* Hal. 22

¹⁵ M. Adian Firmas, "Prospek Demokrasi Di Myanmar", Jurnal Universitas Paramida, Vol. 2, No. 2, (2003), Hal. 130-131

¹⁶ "Kisah Perang: Tiga Kudeta Myanmar dan Berakhirnya Burma" dalam

<https://www.kompas.com/global/read/2021/03/02/213047970/kisah-perang-tiga-kudeta-myanmar-dan-berakhirnya-burma?page=all>, diakses tgl 17 Desember 2021 Jam 19.00

kudeta pertama terhadap pemerintahan semi-demokrasi pada tahun 1962 menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar.¹⁷

Kudeta Tahun 1962

Melansir Forbes, pada tahun 1962, empat belas tahun setelah negara itu merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Tatmadaw (sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar), yang berada dibawah Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil, kemudian memasang rezim otoriter.¹⁸ Kudeta yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1962 ini merupakan gerbang awal dimulainya pemerintahan satu partai dan dominasi politik tentara di negara yang kala itu bernama Burma yang berlangsung selama 26 tahun.

Dalam kudeta tersebut, militer menggantikan pemerintahan sipil AFPFL, yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, dengan Dewan Revolusi Persatuan, yang diketuai oleh Jenderal Ne Win. Dapat diketahui bahwa kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win dalam menurunkan Perdana Menteri U Nu sebagai pimpinan negara yang sudah berkuasa sejak tahun 1948 karena dianggap tidak mempunyai kemampuan atau berkapabilitas dalam memimpin negara. Turunnya Perdana Menteri U Nu seperti menjadi pembuka rezim militer yang sangat berkuasa di Myanmar.¹⁹

Pemerintahan U Nu sendiri secara bertubi-tubi menghadapi tantangan yang berat dalam membangun negara. Hal itu dimulai dari adanya tantangan separatis dari kelompok-kelompok minoritas, pemberontakan komunis, ketimpangan ekonomi, masalah pusat-daerah, kebobrokan birokrasi, sampai dengan perpecahan ideologi yang begitu hebat di antara pimpinan AFPFL yang memrintah akibat politik uang dan korupsi, sehingga menyebabkan kewibawaan AFPFL merosot. Wujudnya perpecahan dalam AFPFL itu menyebabkan kestabilan negara terganggu, ancaman disintegrasi, kekerasan berdarah, intervensi asing, yang mengakibatkan konflik dengan tensi tinggi mulai terlihat, sehingga mendorong U Nu pada tanggal 24 September 1958 menyerahkan kekuasaan kepada militer di bawah Jenderal Ne Win. Ne Win kemudian membentuk pemerintahan sementara yang bertujuan menstabilkan keadaan, sampai dengan diselenggarakannya pemilihan umum.²⁰

Sesudah pemilihan umum 1960 U Nu berkuasa kembali setelah partainya yang baru, yakni AFPFL-Bersih memenangi pertarungan. Namun, lagi-lagi Nu gagal membangun negara.

¹⁷ Firdaus Muhamad Iqbal, Indah Dwiprigitaningtias, "Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2021), Hal. 118-119

¹⁸ "Bagaimana Kisah Junta Militer Myanmar Kuasai Negara Melalui Kudeta?" dalam <https://tirto.id/bagaimana-kisah-junta-militer-myanmar-kuasai-negara-melalui-kudeta-f9Tm>, diakses tgl 18 Desember 2021 jam 10.00

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mohammad Maiwan, "Gerakan Mahasiswa Dalam Kemelut Politik Di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan Kebebasan", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 13, No. 2 (April 2014), Hal. 48

Berbagai permasalahan muncul, mulai dari dasar pemerintahan yang memecah belahkan rakyat berkenaan dengan posisi agama Budha; masalah minoritas yang menuntut persamaan; kemerosotan ekonomi; tuntutan perlindungan undang-undang bagi pegawai pemerintah dan lain-lain. Keadaan ini mengakibatkan pihak tentara sekali lagi melancarkan kudeta pada tanggal 2 Maret 1962.²¹

Kurang dari dua tahun setelah pemerintah sementara menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah AFPFL, pada 2 Maret 1962, Ne Win kembali merebut kekuasaan dalam kudeta yang dilakukan militer. Ne Win menjadi kepala negara sebagai Ketua Dewan Revolusi Uni dan juga Perdana Menteri. Dia menangkap U Nu, Sao Shwe Thaik, dan beberapa lainnya, dan mendeklarasikan negara sosialis yang dijalankan oleh “Dewan Revolusi” perwira militer senior. Putra Sao Shwe Thaik, Sao Mye Thaik, ditembak mati dalam apa yang umumnya digambarkan sebagai kudeta “tak berdarah”.²²

Memasuki periode Kediktatoran Konstitusional 1974, Jenderal Ne Win memperkenalkan konstitusi baru dan mengizinkan pemilu. Kekuasaan tak lagi di tangan militer, melainkan berada pada pemerintahan terpilih. Akan tetapi transfer kekuasaan hanya sebatas istilah, karena dialihkan dari Jenderal Ne Win kepada U Ne Win alias dirinya sendiri. Pemerintahan Burma terus terpusat di bawah partai sokongan militer, *Burma Socialist Program Party* (BSPP). sehingga selama satu dekade lebih, permasalahan yang terjadi di Myanmar berujung pada kekecawaan rakyat terhadap pihak militer, hingga 1987 kestabilan baik sosial, ekonomi, maupun politik tetap menjadi masalah baik antara pihak sipil maupun militer.²³

Kudeta Tahun 1988

Kudeta kedua berakar dari tahun 1985, bisa dilihat bahwa latar belakang ekonomi menjadi sebab munculnya demonstrasi secara besar-besaran yang terjadi pada tahun 1988, dimana selama tahun tersebut pihak sipil kecewa dengan pemerintahan yang pada masa itu dikuasai militer dan menuntut untuk mundur, akan tetapi militer masih dapat menguasai kekuasaan hingga tahun 1990.²⁴

Pada tahun 1975, kelompok minoritas di Burma membentuk Front Demokratik Nasional dan melakukan pemberontakan secara gerilya. Pada tahun 1987, Burma mengalami devaluasi mata uang. Pemerintah melegalkan uang kertas 45 *kyat* serta 90 *kyat*. Keadaan ini tentu saja membuat rakyat semakin memberontak kepada pemerintah. Demonstrasi yang awalnya

²¹ *Ibid.* Hal. 48-49

²² Firdaus Muhamad Iqbal, Indah Dwiprigitaningtias, “Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2021), Hal. 120

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dilakukan oleh kelompok minoritas, masyarakat sipil, dan mahasiswa, pada pada akhirnya diikuti pula oleh para biksu. Puncaknya adalah pada tahun 1988 tepatnya pada bulan Juli. U Ne Win akhirnya turun dari jabatan Perdana Menteri dan melimpahkan jabatannya kepada Jenderal Sein Lwin.²⁵

Adanya tekanan bertubi-tubi akibat kemerosotan ekonomi negara dan konflik domestik, pada bulan Juli 1988 dalam Konggres BSPP Jenderal Ne Win mengakui berbagai kesalahan dalam kebijakan ekonomi yang diterapkannya dan menganggapnya sebagai eksperimen yang gagal. Ia kemudian mundur dan digantikan oleh Jenderal Sein Lwin sebagai ketua BSPP sekaligus presiden Myanmar yang baru.²⁶

Masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang ditetapkan Ne Win karena Sein Lwin termasuk dalam jajaran militer yang menumpas habis demonstran pada tahun 1962.²⁷ Pada tanggal 8 Agustus 1988 demonstrasi mencapai puncaknya yang melibatkan sedikitnya satu juta warga Myanmar turun ke jalanan. Para demonstran bergerak dari Rangoon membakar bus, merusak gedung-gedung pemerintah serta fasilitas umum lainnya. Pemerintah kemudian bertindak keras menumpasnya di tengah kecaman masyarakat internasional. Dikabarkan tidak kurang dari 3000 orang telah terbunuh di wilayah Rangoon saja. Peristiwa itu dikenal dengan insiden 8.8.888.²⁸

Sein Lwin pun akhirnya mundur dari jabatan pada tanggal 12 Agustus 1988 dan posisi Perdana Menteri akhirnya digantikan oleh Dr. Maung Maung. Pada rezim ini, Maung membebaskan tahanan politik, mengizinkan kembali beroperasinya partai politik selain BSPP.²⁹

Namun demikian, para demonstran tetap tidak puas mengingat kedekatan Maung dengan Ne Win. Para demonstran menuntut Maung-Maung mundur. Situasi internal dalam negara yang semakin kalut, dan perpecahan yang melanda BSPP menyebabkan ancaman disintegrasikan di depan mata. Akibatnya pada tanggal 18 September 1988 seorang kawan dekat Ne Win, yakni Jenderal Saw Maung melancarkan kudeta, memecat Maung Maung dan pemerintahan BSPP, menertibkan keadaan, memerintahkan pegawai negeri bekerja seperti semula, memblokir jalan-jalan, melarang orang berkumpul lebih dari 5 orang, membersihkan jalan-

²⁵ Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N, "Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern", Jurnal Pena Wimaya, Volume 1, No. (Juni 2021), Hal. 48

²⁶ Mohammad Maiwan, "Gerakan Mahasiswa Dalam Kemelut Politik Di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan Kebasan", Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 13, No. 2 (April 2014), Hal. 54

²⁷ Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N, "Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern", Jurnal Pena Wimaya, Volume 1, No. (Juni 2021), Hal. 48

²⁸ *Ibid.* Hal. 54-55

²⁹ Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N, "Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern", Jurnal Pena Wimaya, Volume 1, No. (Juni 2021), Hal. 48

jalan barikade, dan membubarkan pusat-pusat demonstrasi serta menembak mati mahasiswa yang melawan. Pada tanggal 26 September Junta mendirikan *State Law and Order Restoration Council*/Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara (SLORC) di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung.³⁰

Kudeta Tahun 2021

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kudeta kembali terjadi di Myanmar, sejarah kelam tahun 1962 kembali terjadi pada tahun 2021 ini, dimana pemerintahan sipil digulingkan oleh junta militer. Babak baru krisis kudeta ini kembali menunjukkan betapa ambisinya militer dalam mempertahankan dominasinya. Militer telah berkuasa selama 60 tahun terakhir dan pihak militer tetap menjadi kunci pemegang dalam mengambil alih kekuasaan terhadap pemerintahan Myanmar.

Kudeta 2021 terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2015. Partai militer, dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, hanya memenangkan 33 kursi.³¹ Hasil pemilu pada November 2020 lalu dinilai curang oleh Junta Militer Myanmar. Junta Militer dapat dengan mudah melakukan interupsi terhadap pemerintahan resmi yang merupakan hasil pilihan rakyat, hal ini terjadi karena pengaruh militer yang masih kuat.³²

Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing.³³ Pasal 417 dalam konstitusi negara membenarkan kudeta Min Aung Hlaing, karena mengizinkan militer merebut kekuasaan dalam situasi darurat atau ketika kedaulatan negara sedang terancam. Kali ini, militer menggugat hasil perhitungan suara dan menuduh Komisi Pemilihan Umum. Namun tuduhan itu langsung ditepis oleh Komisi Pemilihan Umum. Militer juga melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung, tetapi masih ditangguhkan. Pemerintah juga dianggap gagal dalam penyelenggaraan Pemilu yang justru

³⁰ Mohammad Maiwan, "Gerakan Mahasiswa Dalam Kemelut Politik Di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan Kebebasan", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 13, No. 2 (April 2014), Hal. 55

³¹ Firdaus Muhamad Iqbal, Indah Dwiprigitaningtias, "Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2021), Hal. 122

³² Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N, "Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern", *Jurnal Pena Wimaya*, Volume 1, No. (Juni 2021), Hal. 54

³³ Firdaus Muhamad Iqbal, Indah Dwiprigitaningtias, "Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2021), Hal. 122

dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Masyarakat sipil umumnya menolak campur tangan junta ke dalam pemerintahan dan mendesak agar junta segera mengembalikan pemerintahan kepada presiden terpilih. Situasi semakin parah, militer dan kepolisian semakin agresif dalam menertibkan unjuk rasa.³⁴

B. Pengakuan (*Recognition*) Pemerintahan Baru Hasil Kudeta Junta Militer Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, Pengertian pengakuan (*recognition*) merupakan bentuk pernyataan formal tentang status negara yang berdaulat dari suatu negara lainnya. *Recognition* sebagai sebuah tindakan diplomatik dapat diberikan secara sepihak oleh satu negara maupun lebih. Tujuan praktis dari *recognition* adalah untuk mengawali hubungan resmi antara negara yang mengakui dengan negara yang diakui. Pengakuan secara konstitutif dapat menciptakan status kenegaraan atau melengkapi otoritas pemerintahan baru dilingkungan internasional.³⁵

Negara sebagai pribadi internasional yang membutuhkan hubungan dengan negara lain, maka memerlukan suatu pengakuan guna mengadakan hubungan yang akan melahirkan hak dan kewajiban internasional yang harus dilaksanakan pada tingkat internasional. Pengakuan (*recognition*) merupakan pernyataan dari suatu negara mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional.

Pemerintahan baru pada suatu negara juga perlu mendapat pengakuan dari negara lain guna menjalin hubungan diplomasi maupun kerjasama antar negara. Pengakuan pemerintah baru adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa pemerintah yang baru terbentuk disatu negara tertentu itu adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan administratif untuk mewakili negaranya secara sah. Pengakuan ini menjadi sangat penting dalam hal pergantianpemerintah secara inkonstitusional, sementara dalam pergantian pemerintah secara konstitusional pengakuan hanya bersifat formalitas saja.³⁶

Pergantian pemerintahan secara inkonstitusional salah satunya adalah melalui cara kudeta. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 telah terjadi peristiwa kudeta yang melanda negara tetangga kita yaitu Myanmar. Kudeta ini dilakukan oleh junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dan presiden terpilih Win Myint yang

³⁴ Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N, "Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern", Jurnal Pena Wimaya, Volume 1, No. (Juni 2021), Hal. 54

³⁵ Brenda Lengkong, "Fungsi Pengakuan (*Recognition*) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional" Lex Administratum, Vol. VI No. 1, (Jan-Mar, 2018), Hal. 21

³⁶ Yuli Fachri, "Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional", Jurnal Antar Bangsa, Vol. 2, No. 2, (Juli 2003)

terpilih secara demokrasi melalui pemilu pada november 2020. Akibat peristiwa tersebut maka pemerintahan di Myanmar mengalami pergantian dari pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang terpilih melalui demokrasi, menjadi pemerintahan junta militer yang berkuasa melalui proses kudeta.

Pengakuan Terhadap Pemerintahan Junta Militer Myanmar

Indonesia menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak memberi pengakuan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar, meskipun telah menyepakati komunike bersama (*joint communique*) pertemuan ke-54 para menteri luar negeri ASEAN (AMM). menurut direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R Suryodipuro, pengesahan komunike ASEAN tersebut tidak bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap junta Myanmar.³⁷

Kekhawatiran akan pengakuan junta militer Myanmar juga disampaikan oleh Amerika Serikat kepada Kamboja yang akan akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2022 mendatang. Konselor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Derek Chollet, mendesak Kamboja untuk tidak memberikan pengakuan apa pun kepada junta militer Myanmar ketika Kamboja memegang kekuasaan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan. Chollet, dalam kunjungan singkatnya ke Phnom pada Jumat, menyeru Kamboja untuk terus mengecualikan pejabat junta Myanmar serta mendesak negara itu untuk memajukan dan menjunjung tinggi rencana perdamaian oleh ASEAN.³⁸

Pernyataan dan harapan Chollet membuahkan hasil dimana dalam KTT yang diselenggarakan bulan Oktober lalu tidak dihadiri oleh junta militer Myanmar. Junta militer Myanmar menolak mengirim perwakilan setelah pemimpin junta militer tak diundang karena dianggap mengabaikan komitmen untuk meredakan kekacauan usai kudeta di negara itu.³⁹

Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati bahwa pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tidak diundang ke KTT virtual ASEAN pada 26-28 Oktober. Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/10/2021), ASEAN menyatakan akan menerima perwakilan non-politik dari Myanmar dalam KTT itu. Namun pada Senin (25/10) waktu

³⁷ "Indonesia Tegaskan ASEAN Tak Beri Pengakuan Terhadap Junta Myanmar" Dalam <https://mediaindonesia.com/internasional/423159/indonesia-tegaskan-asean-tak-beri-pengakuan-terhadap-junta-myanmar>, Diakses Tanggal 30 Desember 2021 Jam 10.30

³⁸ "AS Desak Kamboja tak Beri Pengakuan ke Junta Myanmar", Dalam <https://www.republika.co.id/berita/r3wsov377/as-desak-kamboja-tak-beri-pengakuan-ke-junta-myanmar>, Diakses Tanggal 30 Desember 2021 Jam 14.00

³⁹ "Pemimpin Junta Militer Tak Diundang, Myanmar Boikot KTT ASEAN" Dalam <https://news.detik.com/internasional/d-5783431/pemimpin-junta-militer-tak-diundang-myanmar-boikot-ktt-asean>. Diakses Tanggal 30 Desember 2021 Jam 14.30

setempat, Myanmar menegaskan hanya akan menyetujui pemimpinnya atau menteriya untuk hadir.⁴⁰

Sikap ASEAN ini selaras dengan pernyataan PBB yang mengecam aksi kudeta junta militer Myanmar. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dikabarkan telah menyetujui draf pernyataan yang mengecam kudeta militer di Myanmar, sekaligus mengutuk aksi represif rezim terhadap demonstran yang menyerukan pembebasan pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.⁴¹ Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada juga telah memberikan sanksi kepada Myanmar.⁴²

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan junta militer Myanmar belum mendapatkan pengakuan formal dari negara lain atau masyarakat internasional.

Berkaitan dengan pengakuan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar yang berkuasa melalui proses kudeta, terdapat beberapa doktrin yang berkaitan mengenai hal ini, yaitu Doktrin Tobar dan Doktrin Estrada.

1) Doktrin Tobar

Menurut prinsip ini suatu negara harus berupaya untuk tidak mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukan suatu pemerintahan tersebut didasarkan atas kudeta militer atau pemberontakan. Sebelum diakui, pemerintah tersebut harus diakui secara konstitusional. Karena itu Doktrin Tobar tersebut dinamakan juga sebagai Doktrin legitimasi konstitusional.⁴³

2) Doktrin Estrada

Yaitu bahwa penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain.⁴⁴

Kedua doktrin tersebut hendaknya dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan bagi masyarakat internasional dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar.

Selain itu Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo menyebutkan bahwa suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ "Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer Myanmar" Dalam <https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/dewan-keamanan-pbb-kutuk-kudeta-militer-myanmar/3>, Diakses Tanggal 31 Desember 2021 Jam 17.06

⁴² *Ibid*.

⁴³ "Pengakuan Dalam Hukum Internasional" Dalam

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tb0imyBFkhUJ:bahan-ajar.esaunggul.ac.id/kum401/wp-content/uploads/sites/1365/2019/12/Hukum-Internasional-Pertemuan-9.doc+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Diakses Pada 04 Januari 2021 Jam 15.00

⁴⁴ *Ibid*.

mengadakan hubungan dengan negara lain.⁴⁵ Myanmar sebenarnya telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut, namun dalam penduduk yang permanen sepertinya akan menemui kesulitan karena masyarakat Myanmar tidak setuju dengan pemerintahan junta militer dan ingin pemerintahan sipil *de facto* Aung San Suu Kyi yang mana terpilih oleh rakyat secara demokrasi ini menjadi pemimpin mereka.

Dampak Dari Tidak Adanya Pengakuan Terhadap Junta Militer Myanmar

Pengakuan akan lebih menjamin kedudukan suatu negara sebagai subyek Hukum Internasional, karena fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar bagi organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.⁴⁶

Pemerintahan hasil kudeta junta militer di Myanmar yang tidak memperoleh pengakuan ini akan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Suatu negara atau pemerintahan baru yang belum memperoleh pengakuan akan memberi kesan kepada negara lain bahwa negara atau pemerintahan baru tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban internasional. Oleh karena itu pengakuan merupakan hal yang sangat penting yang harus dipunyai oleh tiap negara atau pemerintahan baru guna kepentingan negaranya.

Oppenheim berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu pernyataan kemampuan suatu negara baru. Bagi negara (pemerintah) baru yang lahir melalui cara-cara damai atau melalui proses konstitusional, biasanya ia tidak begitu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dari dunia luar.⁴⁷

Berbeda halnya dengan pergantian kekuasaan di Myanmar yang mana melalui proses inkonstitusional yaitu dengan cara kudeta yang dilancarkan junta militer terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, menjadikan pengakuan mungkin sangat sulit didapatkan bagi junta militer, ditambah dengan tindak kekerasan militer terhadap para demonstran yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari demonstran, hal ini merupakan kekerasan HAM berat yang menimbulkan keprihatinan serta kecaman masyarakat

⁴⁵ Montevideo Convention on the Right and Duties of States, Pasal 1

⁴⁶ S. Tasrif, 1987, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abidrin, Hal. 3

⁴⁷ Brenda Lengkong, "Fungsi Pengakuan (*Recognition*) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional" *Lex Administratum*, Vol. VI No. 1, (Jan-Mar, 2018), Hal. 23

internasional. Tindakan militer ini menambah sulitnya mereka dalam memperoleh pengakuan dari dunia luar.

Upaya Junta Militer Myanmar Dalam Memperoleh Pengakuan

Pemerintah junta militer Myanmar telah mengajukan permintaan kepada PBB untuk mengganti utusan Myanmar di kursi PBB menggantikan utusan yang telah diutus sebelumnya oleh pemerintahan sipil pimpinan Suu Kyi yaitu Kyaw Moe Tun, dan menggantinya dengan veteran militer Aung Thurein.

Namun permintaan junta militer tersebut masih ditunda prosesnya oleh PBB. Dalam hal ini PBB juga menunda permintaan Taliban untuk memperoleh Kursi di PBB. Majelis Umum PBB, pada Senin (6/12), mempertahankan keputusannya untuk menunda lebih lama tindakan yang mengizinkan pihak Taliban dan junta militer Myanmar dalam mewakili Afghanistan dan Myanmar di lembaga internasional itu. Komite Kredensial Majelis Umum PBB sebelumnya telah mengumumkan pada minggu lalu bahwa pihaknya akan menunda evaluasi terhadap permohonan Taliban dan junta militer Myanmar agar bisa mewakili negara mereka di dalam badan beranggotakan 193 negara itu.⁴⁸

KESIMPULAN

1. Myanmar merupakan negara yang sering mengalami peristiwa kudeta. Tercatat sudah tiga kali kudeta terjadi di negara itu, yaitu pada 1962, 1988, dan yang terbaru terjadi di 2021 tepatnya pada tanggal 2 Febuari lalu. Kudeta di Myanmar dilakukan oleh pihak militer yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan sebelumnya, namun pada kudeta 2021 ini yang melatar belakangi terjadinya kudeta militer terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi ialah hasil pemilu pada November 2020. Dimana partai Aung San Suu Kyi yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, sedangkan Partai Militer, dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan hanya memenangkan 33 kursi. Militer menuding adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan menjadikan alasan untuk melancarkan kudeta. Banyaknya kudeta yang terjadi di Myanmar menunjukkan bahwa junta militer memang sangat berambisi untuk berkuasa dan mempertahankan dominasinya di Myanmar.
2. Negara-negara ASEAN telah sepakat untuk tidak memberikan pengakuan terhadap pemerintahan baru hasil kudeta junta militer di Myanmar. PBB serta masyarakat

⁴⁸ "PBB Tolak Keanggotaan Taliban dan Junta Myanmar", Dalam <https://koran-jakarta.com/pbb-tolak-keanggotaan-taliban-dan-junta-myanmar?page=all>, Diakses Tanggal 31 Desember 2021 Jam 18.16

internasional juga mengecam aksi kudeta yang telah memakan banyak korban dari rakyat sipil tersebut. Pengakuan yang tak kunjung didapat oleh junta militer tersebut maka junta Myanmar melakukan upaya dengan mengajukan pergantian Duta Besar Myanmar untuk PBB yang diutus oleh pemerintahan sipil yaitu Kyaw Moe Tun, dan menggantinya dengan utusan dari junta militer yaitu Aung Thurein. Namun permintaan junta militer Myanmar ini masih ditunda oleh PBB dan utusan pemerintahan sipil Myanmar Kyaw Moe Tun dapat kembali menjalankan tugasnya. Namun junta militer tidak tinggal diam mereka tetap akan berusaha agar utusannya itu duduk di PBB dan memudahkan pemerintahan mereka memperoleh pengakuan dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna, (2005), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua*, Bandung; Pt. Alumni.
- Huala Adolf, (1996), *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta; Rajawali Pers.
- S. Tasrif, (1987), *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abidrin

Konvensi-konvensi

Montevideo Convention on the Right and Duties of States

Skripsi

- Ikrimah, (2010), *Peranan Asean Mendorong Pemerintahan Militer Dalam Menegakkan Demokrasi Di Myanmar*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Jurnal

- Pujilestari, Yulita. (2018), *Peranan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan*, Vol No. 5
- Lengkong, Brenda. (2018), *Fungsi Pengakuan (Recognition) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*, Vol. VI No.1.
- Yuli Fachri, (2003), *Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 2.
- A. Mahsyur Effendi, Andri, (2011), *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 3.

Fahri Ananta Said, Partogi J. Samosir, (2017), *Dampak Kudeta Presiden Viktor Yanukovych Dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina Dengan Uni Eropa*, Vol. 3, No.1

M. Adian Firnas, (2003), *Prospek Demokrasi Di Myanmar*, Vol. 2, No. 2.

Firdaus Muhamad Iqbal, Indah Dwiprigitaningtias, (2021), *Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Vol. 3, No. 1

Mohammad Maiwan, (2014), *Gerakan Mahasiswa Dalam Kemelut Politik Di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan Kebasan*, Vol. 13, No. 2.

Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N, (2021), *Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern*, Jurnal Pena Wimaya, Volume 1, No. 2

Internet

Sekar Kinasih. (8 Februari 2021), *Sejarah Membuktikan Militer Myanmar Memang gatal Kudeta*, Diakses Pada 04 Desember 2021. Dari Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-membuktikan-militer-myanmar-memang-gatal-kudeta-f91X>

Tomi Patrio Sorongan. (09 Februari 2021), *Bak Candu, Myanmar & Sejarah Kudeta Yang Terus Berulang*, Diakses Pada 04 Desember 2021. Dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210209135949-4-222152/bak-candu-myanmar-sejarah-kudeta-yang-terus-berulang/2>

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (29 Agustus 2021), *Kudeta Myanmar 2021*, Diakses Pada 04 Desember 2021. Dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta_Myanmar_2021

BBC News Indonesia. (03 Februari 2021), *Kudeta Myanmar: Mengapa China Halangi PBB Kutuk Langkah Militer Mengambil Alih Kekuasaan?*, Diakses Pada 18 Desember 2021. Dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55914467>

Adtya Jaya Ismara. (02 Maret 2021), *Kisah Perang: Tiga Kudeta Myanmar Dan Berakhirnya Burma*, Diakses Pada 17 Desember 2021. Dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/02/213047970/kisah-perang-tiga-kudeta-myanmar-dan-berakhirnya-burma?page=all>,

Alexander Haryanto. (02 Februari 2021), *Bagaimana Kisah Junta Militer Myanmar Kuasai Negara Melalui Kudeta?*, Diakses Pada 18 Desember 2021. Dari Tirto.id: <https://tirto.id/bagaimana-kisah-junta-militer-myanmar-kuasai-negara-melalui-kudeta-f9Tm>

Media Indonesia. (04 Agustus 2021), *Indonesia Tegaskan ASEAN Tak Beri Pengakuan Terhadap Junta Myanmar*, Diakses Pada 30 Desember 2021. Dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/internasional/423159/indonesia-tegaskan-asean-tak-beri-pengakuan-terhadap-junta-myanmar>

Unggul Wirawan. (04 Agustus 2021), *ASEAN Kompak Hindari Pengakuan Formal Junta Myanmar*, Diakses Pada 30 Desember 2021. Dari Berita Satu:

<https://www.beritasatu.com/dunia/809533/asean-kompak-hindari-pengakuan-formal-junta-myanmar>

Teguh Firmansyah. (11 Desember 2021), *AS Desak KAmboja Tak Beri Pengakuan Ke Junta Myanmar*, Diakses Pada 30 Desember 2021. Dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/r3wsov377/as-desak-kamboja-tak-beri-pengakuan-ke-junta-myanmar>

Novi Christiastuti. (26 Oktober 2021), *Pemimpin Junta Militer Tak Diundang, Myanmar Boikot KTT ASEAN*, Diakses Pada 30 Desember 2021. Dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5783431/pemimpin-junta-militer-tak-diundang-myanmar-boikot-ktt-asean>

IDN Times. (11 Maret 2021), *Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer Myanmar*, Diakses Pada 31 Desember 2021. Dari IDN Times: <https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/dewan-keamanan-pbb-kutuk-kudeta-militer-myanmar/3>

Selolahyo Basoeki Utomo S. (08 Desember 2021), *PBB Tolak Keanggotaan Taliban Dan Junta Myanmar*, Diakses Pada 31 Desember 2021. Dari Koran Jakarta.com: <https://koran-jakarta.com/pbb-tolak-keanggotaan-taliban-dan-junta-myanmar?page=all>

DW.com. (02 Desember 2021), *PBB Tunda Permintaan "Ganti Utusan" Junta Myanmar dan Taliban*, Diakses Pada 31 Desember 2021. Dari DW.com: <https://www.dw.com/id/pbb-tak-beri-kursi-kepada-utusan-junta-myanmar-dan-taliban/a-59993174>